

**PERANAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN**



BOSOWA
OLEH

MUHAMMAD YUSDY GERY RUNTU
4591011135 | 9911100410035

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG

1995

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
(1990/1991 - 1994/1995)

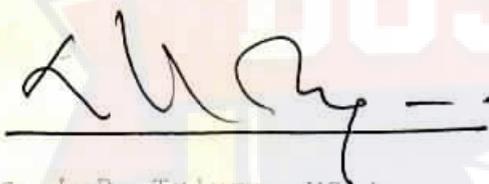
NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD YUSDY GERY RUNTU
NOMOR STAMBUK/NIRM : 4591011135/9911100410035
JURUSAN : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. L.P. Tulung, MS)



(Drs. Palipada Palisuri)

Mengetahui/Mengesahkan

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" UP.

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan



(Drs. Palipada Palisuri)



(Rafiuddin, SE)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Senin - 21 Agustus 1995
Skripsi atas nama : Muhammad Yusdy Gery Runtu
Nomor Stb / Nirm : 5491011135/9911100410035

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Panitia Ujian Skripsi :

Pengawas Umum :

1. Dr. A. Jaya Sose, SE, MBA
(Rektor Universitas "45") (.....)
 2. Prof. Dr. H. A. Karim Saleh
(Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS) (.....)
- Ketua : Drs. Palipada Palisuri (.....)
- Sekretaris : Rafiuddin, SE (.....)

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. Latanro (.....)
2. Drs. L. p. Tulung, MS (.....)
3. Drs. Palipada Palisuri (.....)
4. Ramli Manrapi, SE, MSi (.....)

KATA PENGANTAR.

Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, panulis senantiasa tujukan ke hadirat Allah S.W.T karena berkat limpahan serta izin-Nya jualah, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan yang afdol ini penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Muh.Gery Runtu yang telah bersusah payah tanpa kenal keluh kesah.

Penulis menyadari pula bahwa, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. L.P. Tulung, MS, dan Bapak Drs. Palipada Pali-suri yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan menuntun serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Ketua Jurusan Studi Pembangunan serta semua stafnya dan Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu kepada panulis.
3. Bapak Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kantor Biro Pusat Statistik Tingkat I Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan beserta stafnya.
4. Paman Husain Ibrahim dan Paman Drs. Syamsuddin Runtu, yang telah bersusah payah membantu penulis.
5. Adik-adik tercinta, kaum keluarga, rekan-rekan mahasiswa

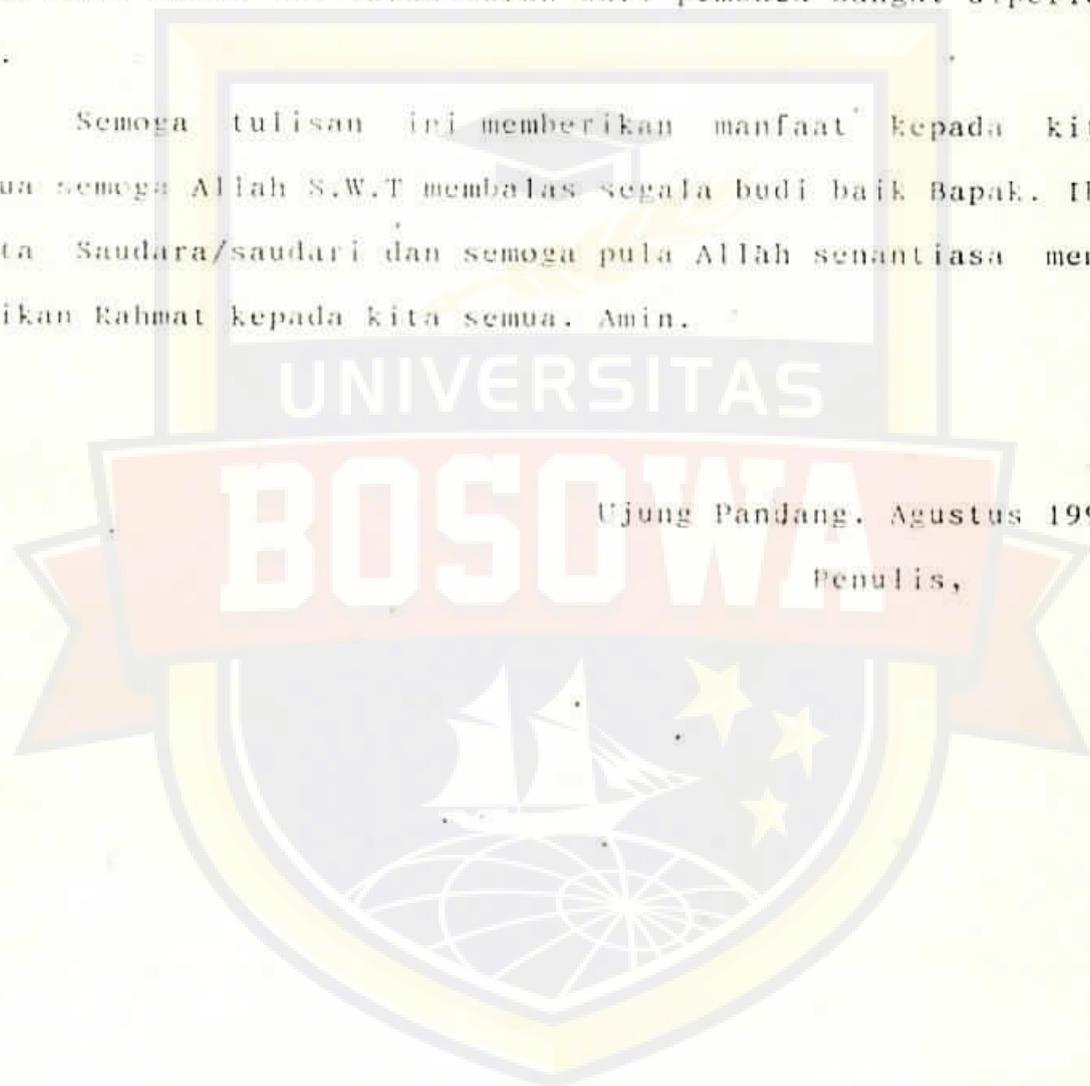
dan sahabat-sahabat lainnya yang telah banyak memberikan petunjuk, dorongan serta bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari pula bahwa skripsi ini masih banyak menemui kekurangan-kekurangan baik isi maupun tata cara penulisan, untuk itu saran-saran dari pembaca sangat diperlukan.

Semoga tulisan ini memberikan manfaat kepada kita semua semoga Allah S.W.T membalas segala budi baik Bapak, Ibu serta Saudara/saudari dan semoga pula Allah senantiasa memberikan Rahmat kepada kita semua. Amin.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Penulis,



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan	6
1.3.2. Kegunaan	6
1.4. Hipotesis	7
BAB II KERANGKA TEORI	8
2.1. Konsep Pendapatan	8
2.2. Konsep Pengangkutan	18
BAB III METODOLOGI	22
3.1. Daerah Penelitian	22
3.1.1. Letak Geografis	22
3.1.2. Luas Wilayah dan Keadaan Penduduk ..	24
3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data	26
3.3. Peralatan dan Model Analisis	27
3.4. Konsep Operasional.	28

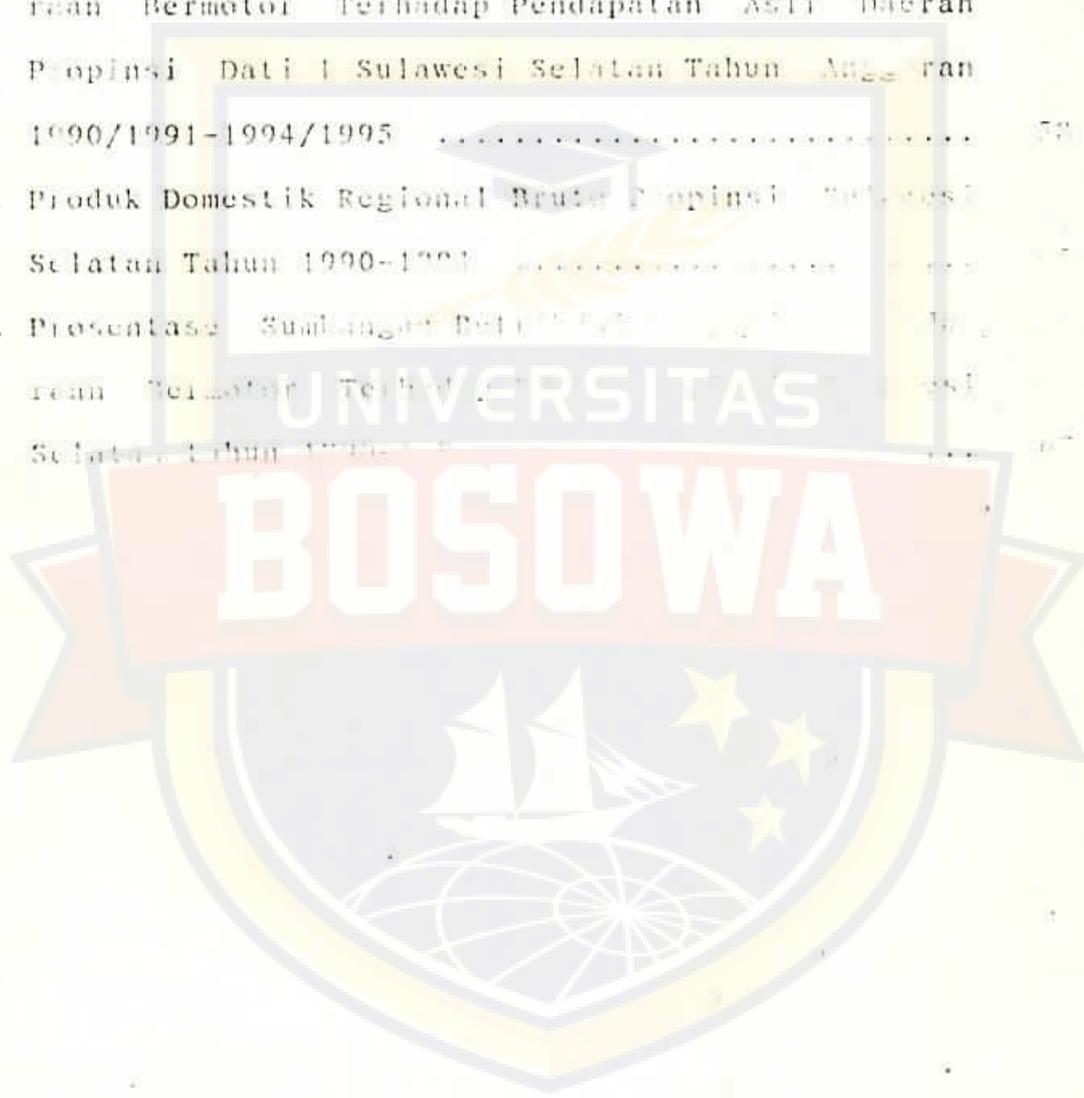
BAB	IV	PERKEMBANGAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PDRB PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN	29
	4.1.	Volume Kendaraan Bermotor dan Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan	29
	4.1.1.	Volume dan Jenis Kendaraan Bermotor	31
	4.1.2.	Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan	37
	4.2.	Sumbangan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan	51
	4.2.1.	Sumbangan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Propinsi Sulawesi Selatan	52
	4.2.2.	Sumbangan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan	64
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN	73
	5.1.	Simpulan	73
	5.2.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKAN

DAFTAR TABEL

Nomor :	Halaman
1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk diperinci per Kabupaten/Kotamadya	25
2. Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan	32
3. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Propinsi Sulawesi Selatan	34
4. Banyaknya Jenis Kendaraan Bermotor Berdasarkan Izin Yang dikeluarkan	36
5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	38
6. Realisasi Penerimaan Retribusi Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	41
7. Realisasi Penerimaan Dinas Dinas Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	46
8. Realisasi Penerimaan Laba BUMD Propinsi Dati I Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	49
9. Realisasi Penerimaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	54

10. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Dati 1 Sulawesi Selatan Dari Tahun Anggaran 1990/1991-1994/1995	56
11. Prosentase Sumbangan Retribusi Pengujian Kenda- raan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Dati 1 Sulawesi Selatan Tahun Angg ran 1990/1991-1994/1995	58
12. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1990-1991	62
13. Prosentase Sumbangan Pajak Pertambahan nilai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan Tahun 1990-1991	68



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di lapangan ekonomi selalu bertalian dengan suatu keadaan yang masih harus digali dan dibangun. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kebutuhan modal dan investasi agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar.

Pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya senantiasa berusaha mencari sumber-sumber bagi pembiayaan pembangunannya, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga menuntut kemampuan pemerintah dalam rangka mobilisasi dana serta penggunaannya secara efektif.

Dana-dana atau pembiayaan pembangunan, penggalan sumber, arah dan cara penggunaannya sangat mempengaruhi perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Dengan meningkatnya peranan pemerintah serta perluasan fungsinya, maka pengelolaan sumber serta penggunaan dana dan pembiayaan pembangunan menjadi amat penting. Sehingga dapat diwujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu peranan pemerintah dalam pembangunan adalah dalam bidang pelayanan transportasi. Transportasi dalam hal ini kendaraan bermotor atau angkutan umum sangat besar peranannya dalam rangka melancarkan produksi atau aktivitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan PP nomor 22 tahun 1990, pada tanggal 19 Desember 1990 oleh Menteri Perhubungan telah menyerahkan 10 (sepuluh) urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Oleh karena itu masing-masing daerah mengupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada se-maksimal mungkin. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya selalu berusaha memelihara dan mengembangkan peningkatan penerimannya.

Penerimaan pemerintah yang terdiri dari pajak, bukan pajak dan retribusi. Sektor retribusi merupakan penerimaan prioritas disamping pajak dalam menunjang pembangunan seluruh daerah-daerah di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Yang secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.

Salah satu penerimaan pemerintah dari retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor. Sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga peranannya semakin ditingkatkan. Atas dasar inilah maka pelayanan terhadap masyarakat akan pengujian kendaraan semakin ditingkatkan.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor ini jauh lebih luas dari waktu-waktu yang lampau berhubung dengan :

- a. Kegiatan pembangunan di mana-mana, serta makin bertambahnya kebutuhan akan transportasi dalam menunjang aktivitas perekonomian.
- b. Makin meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga makin banyak menggunakan jasa transportasi.
- c. Bertambahnya penduduk yang juga membutuhkan transportasi.

Bertambahnya jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan dengan itu membutuhkan jasa angkutan untuk memperlancar aktivitas atau kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan membutuhkan sarana transportasi dalam menunjang kegiatan-kegiatan distribusi, produksi, perdagangan dan lain-lain. Oleh karena itu sarana transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mendukung produktivitas transportasi tersebut, maka pemerintah telah mengupayakan pembuatan jalan-jalan baru, pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sehingga untuk membangun semua itu diperlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mencari sumber dana sebagai alternatifnya.

Keberhasilan suatu program pembangunan pada dasarnya banyak ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup memadai. Untuk itu sumber-sumber dana yang dimiliki oleh setiap daerah harus diketahui kemudian dikelola untuk dimanfaatkan.

Hal itu telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dimana pasal 55 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan daerah.
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah.
2. Sumbangan-sumbangan lainnya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak lain adalah berorientasi pada pembangunan dalam arti yang luas yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat Indonesia guna mewujudkan suatu masyarakat adil makmur, yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu daerah-daerah dimana untuk mengelola sumber-sumber pendapatan keuangannya yakni dengan memungut pajak, retribusi dan sumbangan lainnya sesuai potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber penerimaan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah retribusi yang merupakan sumbangan cukup besar dalam menyediakan dana untuk kas daerah di dalam

menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Didalam memungut pajak, retribusi dan sumbangan-sumbangan lainnya yang masuk setiap tahun anggaran selalu menghitung target penerimaan yang dituangkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu maka target dan realisasi sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan selalu diikuti minimal 5 tahun anggaran terakhir sebagai bahan perbandingan untuk dapat mengambil langkah-langkah di dalam perencanaan untuk meningkatkan pendapatan daerah seluruhnya.

Dengan berpedoman pada latar belakang tersebut di atas maka penulis akan mencoba untuk mengemukakan dalam suatu karya ilmiah tentang peranan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan tahun anggaran 1994/1995.

1.2. Pokok Permasalahan

Bertolak dari judul di atas maka penulis akan membahas masalah yang berkenaan dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Sejauh mana kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ?.

- Bagaimana pula kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Selatan ?:

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian adalah :

- (1) Untuk mengetahui sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- (2) Untuk melihat pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 1990/1991-1994/1995.

1.3.2. Kegunaan

- (1) Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan kontribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah tersebut.
- (2) Menjadi bahan literatur bagi masyarakat yang ingin meneliti hal yang serupa.

1.4. Hipotesis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian untuk membuktikan jawaban yang bersifat sementara atau hipotesis sebagai berikut :

- Diduga bahwa kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Diduga pula bahwa sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap PDRB Sulawesi Selatan adalah relatif kecil.



II. KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Pendapatan

Seirama dengan derap langkah kegiatan pembangunan di negara kita yang semakin meningkat, maka setiap pemerintah daerah harus berusaha untuk membangun daerahnya dengan menggerakkan segala kemampuan atau potensi yang dimiliki demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu untuk membangun diperlukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan.

Keynes mengemukakan teorinya yang dikutip oleh M.L. Jhingan dalam buku "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan" (1990 : 167) menyatakan bahwa :

" Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Pekerjaan total dimaksud merupakan konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah ".

Dari perumusan Keynes tersebut dimana fungsi dari pendapatan adalah konsumsi masyarakat ditambah investasi dan pengeluaran pemerintah. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk melakukan konsumsi. Dimana jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijabatangi oleh investasi.

Investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan tanpa kenaikan pada investasi. Naiknya investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan mening-

kat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi.

Pendapatan yang dimaksud dalam tulisan ini hampir sama dengan penghasilan. Pendapatan secara umum merupakan sesuatu yang didapatkan dari sesuatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh hasil yang berwujud nyata dalam bentuk materi. Namun demikian pendapatan dan penghasilan mempunyai pengertian yang berbeda. W.J.S Poerdarminto di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1989 ; 228) menyatakan bahwa

" Pendapatan adalah 1. hasil pencarian (usaha), perolehan, misalnya; penghasilan tiap bulan, 2. sebagai sesuatu yang didapatkan (dibuat) yang sedianya belum ada, misalnya; hampir sekalian pendapatannya sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia ".

Sedangkan pendapatan menurut Prenggedigdo dalam bukunya "Ensklopedia Umum" (1977 ; 817), dinyatakan bahwa :

" Pendapatan (income), biasanya berupa sejumlah uang yang diterima oleh seorang atau lebih anggota keluarga dari jerih payah kerjanya ".

Dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapatlah dimengerti bahwa sesungguhnya pendapatan itu adalah sesuatu penghasilan yang diperoleh dari pungutan. Sedangkan pungutan itu adalah sejumlah uang atau barang yang diperoleh dari penguasa publik dengan menggunakan kekuasaan politik, atau kekuasaan ekonomis yang timbul dari norma-norma umum yang

telah ditetapkan masyarakat.

Adapun pungutan yang dimaksud di sini adalah terdiri dari : retribusi, sumbangan, pajak, denda, dan sebagainya. Dengan hubungannya dengan hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan hak dan kewajibannya memerlukan sumber pendapatan untuk digali dan dikembangkan.

Hal ini disebabkan karena kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan yang dikuasai berpengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan. Besar kemampuan keuangan dari hasil pendapatan tergantung pada besar dan sumber yang dimiliki.

Dalam kaitan pernyataan yang dimaksud di atas yaitu kemampuan serta peningkatan dan pengembangan personalitas dari aparatur pemerintah yang terkait perlu mendapat perhatian lebih intensif.

Untuk melihat dari edkat pendapatan pemerintah, dimana termasuk di dalamnya adalah sumbangan, maka terlebih dahulu ditinjau penapat BELA FOLDEZ yang dikutip oleh R.A.Rahman Prawiramajaya, (1980 : 40) menyatakan bahwa :

' Pendapatan pemerintah terbagai dalam :

1. Penghasilan pemerintah yang bersifat sama dengan pihak swasta dinamakan privat, misalnya penghasilan perusahaan negara.
2. Penghasilan yang tidak dapat dimiliki atau diterima oleh swasta misalnya pajak ".

Sumber diperolehnya dana bagi pemerintah daerah itu bermacam-macam. Pasal 55 Undang-undang No 5 tahun 1974 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli daerah sendiri, yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan daerah
 - d. Pendapatan dinas-dinas
 - e. Lain-lain usaha daerah yang sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal-pasal berikutnya menyatakan, misalnya mengenai pajak dan retribusi. Dengan suatu undang-undang, sesuatu pajak negara dapat diserahkan kepada daerah. Dengan undang-undang ditentukan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah. Antara pusat dan daerah perlu ada perimbangan keuangan, untuk keperluan itu diatur dengan undang-undang.

Dalam hal pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Achmad Fausi dan Iskandar, (1982 : 36) menyatakan :

- ' Pendapatan daerah adalah komponen dari APBD untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin ".

Dalam penyusunan anggaran keuangan daerah, sepanjang mengenai pendapatan daerah, harus diperhatikan pula peraturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang No.32 tahun 1986 tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah, dan seterusnya.
- b. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1975 tentang pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 195 tentang penyerahan pajak negara kepada daerah.
- d. Peraturan Pemerintah tentang ketetapan persentase dari beberapa penerimaan negara untuk daerah, yang tiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah.

A. Retribusi

Suatu daerah dapat dikatakan daerah otonom apabila daerah tersebut dapat membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Kalaupun suatu daerah otonom belum mampu sepenuhnya membiayai urusan-urusan rumah tangganya, maka paling tidak daerah tersebut harus mampu menutupi belanja rutinnya dengan pendapatan asli daerahnya. Hal ini sebenarnya merupakan salah satu prinsip yang tidak boleh tidak harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam kaitannya dengan itu, maka The Liang Gie, (1980 : 168) menyatakan bahwa :

" Pada prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhannya sehari-hari yang rutin. Apabila untuk kebutuhannya itu daerah masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat, maka

sesungguhnya daerah itu tidak otonom lagi ".

Dari pengertian di atas kita dapat melihat pada satu jenis sumber pendapatan asli daerah yang dimaksud yaitu retribusi. Tentang retribusi ini ditegaskan pula dalam pasal 3 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1957 yang menyatakan bahwa " Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa-jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah ".

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menambah kas daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Seodargo dalam buku " Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (1984 ; 1) bahwa :

" Retribusi adalah suatu pungutan sebagai bayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah ".

Sedangkan menurut Drs. Mulia dalam karangannya berjudul " Buku Keuangan Daerah " (1987 ; 193) menyatakan bahwa :

" Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah ".

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan barupa pengertian akhirnya kita dapat mengambil titik temu yang menyatakan bahwa antara pembiayaan dan jasa dari pemerintah ada hubungan langsung, karena pembiayaan tersebut ditujukan semata-mata bagi si pembayar untuk menetapkan suatu jasa yang tertentu dari pemerintah. Dan pada akhirnya penghasilan

pemerintah yang berasal dari retribusi akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk prasarana misalnya pembuatan jalan, gedung-gedung sekolah dan lain-lain.

Jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengujian kendaraan bermotor
2. Leges
3. Rumah sakit dan balai pengobatan
4. Prakuilifikasi
5. Iuran tambang golongan C
6. Izin trayek
7. Izin usaha perikanan
8. Retribusi ikan asin dan hasil laut
9. Pengujian mutu hasil perikanan
10. Pengujian bahan asal hewan
11. Dokumentasi pelelangan
12. Usaha kawasan pariwisata
13. Iuran air permukaan
14. Usaha rumah makan dan restoran
15. Usaha rekreasi dan hiburan
16. Usaha penggolongan hotel dengan bunga melati
17. Pengendalian/penertiban Miras
18. Upah Uji
19. Surat tanda uji
20. Tanda plat keur

B. Pajak

Dalam hal pengertian pajak, berbagai penulis memberikan pengertian yang berbeda-beda tetapi pada hakekatnya pengertian tersebut adalah sama, karena pada prinsipnya pajak mempunyai kaidah yang konsekwen sementara yang beragam itu seringkali atau pada umumnya terletak pada metode penyajian saja.

Seperti pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr.H. Rohmat Sumitro, SH, dalam bukunya yang berjudul " Pengantar Singkat Ilmu Hukum Pajak " (1981 ; 12) yang menyatakan sebagai berikut :

" Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (Tegen Prestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum ".

Sedangkan menurut Prof. Dr.P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Santoso Brotodiharjo dalam buku " Pengantar Ilmu Hukum Pajak " (1986 ; 2) memberikan batasan seperti berikut ini :

" Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ".

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu garis simpul atau pendekatan minimal bahwa pajak mengandung unsur paksaan dalam penge-

naannya. Paksaan tersebut tercermin dalam bentuk kewajiban dan si wajib pajak untuk membayar kepada pemerintah dengan tidak berdasar suatu perstise langsung yang diberikan oleh pemerintah. Seringkali pemerintah melakukan pungutan dengan model coercion policy (pemaksaan kebijaksanaan) dalam bentuk konkrit seperti penyitaan, penutupan tempat usaha, dan sebagainya, dengan tujuan agar si wajib pajak tersebut dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

Adapun yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi langsung dalam batasan-batasan di atas pada dasarnya mempunyai tendensi bahwa pembayar pajak atau si wajib pajak tidak mendapat imbalan tertentu yang erat hubungannya dengan pembayaran yang dilakukan.

Namun karena kurangnya pemahaman bagi pengertian pajak itu sendiri dikalangan masyarakat awam sehingga beberapa kendala relatif mudah terjadi bagi pemerintah untuk melakukan pungutan-pungutan pajak. Biasanya masyarakat berasumsi bahwa semua pungutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dianggap sebagai pajak yang bersifat paksaan, asumsi seperti ini juga tidak dapat dipersalahkan secara total, namun perlu diketahui bahwa pajak memang adalah suatu jenis pungutan, tetapi tidak semua pungutan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan pajak. Melainkan pungutan-pungutan tersebut tetap mempunyai kategori masing-masing walaupun pada dasarnya pungutan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah seperti yang berbentuk retribusi antara lain retribusi

pasar, terminal, tempat rekreasi, dan lain-lain.

Yang termasuk jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
 2. Bea balik nama kendaraan bermotor
 3. Tunggakan pajak
 4. Denda pajak
 5. Pajak Kendaraan alat angkutan air
 6. Bea balik nama kendaraan bermotor alat angkuta air
- C. Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberi hak untuk mengelola perusahaan sendiri, yang merupakan perusahaan daerah, prinsip pengelolaan haruslah berdasarkan ekonomi perusahaan, dengan demikian maka mencari untung. Sebagian tertentu dari keuntungan wajib disetor ke kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi di bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang-barang dan lain-lain.

D. Dinas Daerah

Selain perusahaan daerah, maka pemerintah daerah pun dilengkapi dengan beberapa macam dinas daerah. Dinas daerah inipun ada beberapa yang menghasilkan uang daerah, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Kesehatan, Peternakan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan sebagainya.

E. Lain-lain Pendapatan Daerah

Masih ada kemungkinan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain yang sah, yang tidak berupa pajak

daerah, retribusi daerah, perusahaan dan dinas daerah, misalnya penerimaan uang oleh pemerintah daerah yang berupa penjualan barang investasi daerah, yang dapat berupa :

1. Subsidi daerah dari pemerintah pusat
2. Subsidi dari daerah tingkat I
3. Bantuan Inpres
4. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain
5. Dan lain-lain sumber di luar pendapatan asli daerah

2.2. Konsep Pengangkutan

Perkembangan lalu lintas kendaraan bermotor mempunyai arti yang sangat penting. Diantaranya dapat mempermudah hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga komunikasi dapat lancar.

Dengan adanya alat angkutan berupa kendaraan bermotor kondisi ekonomi mengalami perubahan yang besar. Hasil bumi yang semula hanya dapat diperdagangkan disekitar daerah yang berdekatan dengan tempat dihasilkannya, semenjak saat itu dapat diangkut dengan cepat dan cermat ke tempat-tempat penjualan yang jauh letaknya. Sehingga perdagangan menjadi lebih teguh kedudukannya hal mana berpengaruh baik pada perumusan harga barang. Pengangkutan barangpun yang berjauhan letaknya turut serta merasakan kemanfaatan dari pada kecepatan serta cara pengirimannya yang teratur.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh W.A.Lewis yang dikutip oleh M.L.Jhingan dalam buku "Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan" (1990 : 197) sebagai berikut :

" Dibanyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tidak terbatas dan dengan upah yang rendah. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Sektor Kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat diproduksi. Sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat diproduksi ".

Dari apa yang telah dikemukakan tersebut, Lewis menyatakan adanya ekonomi dua sektor, yaitu sektor subsisten (tradisional) dan sektor kapitalis (modern).

Ekonomi seperti itu terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibanding dengan sumber alam dan sumber modal, sehingga produktivitas buruhnya tidak berarti. Karena penawaran buruh yang tidak terbatas, industri baru atau industri yang ada dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten.

Dengan ekonomi dua sektor tersebut sehingga ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Untuk mempermudah perpindahan buruh atau hasil bumi atau produksi dari sektor subsisten, maka diperlukan alat angkutan. Sehingga dengan adanya angkutan kendaraan bermotor ini dapat memperlancar kegiatan-kegiatan produksi di sektor subsisten dan sektor kapitalis.

Itu peranan kendaraan bermotor dalam perekonomian sangat besar pengaruhnya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan produksi. Kendaraan bermotor menurut pengamatan kita adalah semua alat atau peralatan yang menggunakan mesin atau motor untuk menfungsikan atau menggerakkannya.

Menurut Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (1989 ; 37), Peraturan Daerah No 5 tahun 1978 tentang Retribusi atas pemakaian jembatan timbang dan alat pengujian kendaraan bermotor untuk peningkatan sarana jalanan dan jembatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan menyatakan bahwa :

" Kendaraan bermotor ialah kendaraan bermotor yang beroda 3 (tiga) atau lebih yang dipergunakan untuk angkutan orang atau barang yang dikenakan wajib timbang atau wajib uji ".

Dengan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa sesungguhnya tidak semua jenis kendaraan bermotor yang wajib uji. Melainkan kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam aktivitas ekonomi untuk mengangkut orang atau barang sehingga memerlukan balas jasa untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengujian atas kendaraan bermotor menurut Himpunan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (1989 ; 37), Peraturan Daerah No 5 tahun 1978 tentang retribusi atas pemakaian jembatan timbang dan alat pengujian kendaraan bermotor untuk peningkatan sarana jalanan dan jembatan dalam wilayah Pro-

pinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagai berikut :

" Pengujian adalah penelitian atas data-data tehnik kendaraan bermotor wajib uji yang dicantumkan dalam buku uji kendaraan ".

Dari pengertian di atas bahwa pengujian tidak hanya sekedar menguji dengan memberikan tanda uji, tetapi juga data-data tehnik yang dipergunakan oleh setiap kendaraan yang wajib uji.



III. METODOLOGI

3.1. Daerah Penelitian

3.1.1. Letak Geografis

Melihat kondisi yang ada maka penulis melakukan penelitian pada Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dimana Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsinya.

Terletak antara $0^{\circ}12'$ Lintang Utara dan 8° Lintang Selatan dan antara $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur Teluk Bone
- Sebelah Selatan Laut Flores
- Sebelah Barat Selat Makassar

Ketinggian dari Permukaan laut, yaitu kebanyakan daerahnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung sehingga ketinggian dari permukaan air laut terdiri dari :

0 - 500 m	seluas	1.450.000 ha
500 - 1.500 m	seluas	1.150.000 ha
didas 1.000 m	seluas	3.367.500 ha

Kemiringan/lereng, karena daerahnya berbukit-bukit, maka kemiringan :

0 - 2°	seluas	1.100.000 ha
3 - 15°	seluas	610.000 ha
16 - 40°	seluas	937.000 ha
didas 40°	seluas	1.130.000 ha

Keadaan temperaturnya relatif tinggi sepanjang tahun yakni rata-rata -26.6°C . Sedangkan luas wilayah $\pm 6.248.254$ ha yang terdiri dari sumber daya alam sebagai berikut :

- Area Hutan	=	3.611.174 ha
Hutan Lindung	=	1.996.050
Hutan Produksi terbatas	=	991.562
Hutan Produksi tetap	=	164.978
Hutan bisa dikomersial	=	259.355
- Hutan suaka alam	=	199.229
- Areal Persawahan	=	563.568 ha
Pengairan teknis	=	103.214
Pengairan $\frac{1}{2}$ teknis	=	37.827
Pengairan sederhana	=	145.824
Tadai hujan	=	265.704
Sawah pasang surut	=	1.142
sawah tidak digunakan	=	9.857
- Areal Perkebunan	=	406.101 ha
- Areal Padang Rumput	=	665.798 ha
- Areal Danau/Rawa/kolam	=	178.000 ha
- Areal Tambak / Empang	=	67.487 ha
- Areal Tegalan / Kebun	=	615.649 ha
- Areal Perumahan dan Pekarangan	=	140.447 ha

Dari keadaan Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka sangat potensial sumber daya alamnya untuk dikembangkan dalam menunjang pembangunan daerah. Konsep-konsep pembangunan yang diterapkan adalah Tri Konsep yaitu : Pengwilayahan Komoditas, Petik olah jual, dan Perubahan Pola

Pikir.

3.1.2. Luas Wilayah dan Keadaan Penduduk

Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 7.123.519 jiwa, dari sekian jumlah tersebut sebagian besar berada pada daerah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani ataupun nelayan. Karena Sulawesi Selatan bercirikan sebagai daerah agraris maka produksi terbesarnya adalah hasil pertanian.

Pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan berkisar antara 1,5 % dan 2 %. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali memang merupakan suatu tantangan besar dalam pembangunan baik di masa sekarang terutama di masa yang akan datang.

Sebagai hal yang prinsipil memang sangat mungkin terjadi yaitu dengan pertumbuhan penduduk yang membengkak terutama akan menyangkut persoalan tenaga kerja. Jika lapangan kerja tidak sanggup menampung jumlah angkatan kerja maka terjadi pengangguran.

Mobilitas penduduk Sulawesi Selatan cukup tinggi yaitu antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Salah satu penyebab terjadinya perpindahan antara lain faktor budaya, faktor sosial ekonomi.

Adapun luas wilayah Sulawesi Selatan yang dirinci menurut Kotamadya/Kabupaten adalah sebagai berikut :

TABEL 1
 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK DIRINCI
 MENURUT KABUPATEN/KOTAMADYA
 SE SULAWESI SELATAN TAHUN 1993

NO	DAERAH TINGKAT II	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK
1	Mamuju	11.057,81	201.511
2	Majene	947,84	151.614
3	Polewali Mamasa	4.781,53	400.590
4	Pinrang	1.961,77	298.764
5	Tana Toraja	3.205,77	361.997
6	Enrekang	1.786,01	148.848
7	Pare Pare	99,33	101.385
8	Sidenreng Rappang	1.883,25	232.445
9	Barru	1.174,71	147.989
10	Pangkep	1.112,29	249.811
11	Maros	1.619,12	240.651
12	Ujung Pandang	175,77	944.372
13	Gowa	1.883,32	429.698
14	Takalar	566,51	205.901
15	Sinjai	819,96	191.388
16	Bulukumba	1.154,67	338.055
17	Selayar	903,35	97.357
18	Bantaeng	395,83	145.188
19	Jeneponto	737,64	286.322
20	Bone	4.559,00	635.681
21	Wajo	2.506,19	396.078
22	Soppeng	1.359,44	227.052
23	Luwu	17.791,43	690.322
	Jumlah	62.482,54	7.123.519

Sumber : Kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan

3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

(1). Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Propinsi Tingkat I Sul-Sel, Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat I Sul-Sel dan Biro Pusat Statistik (BPS) Tingkat I Sul-Sel yang mempunyai kaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan tertulis serta informasi-informasi dari DLLAJR Tingkat I Sul-Sel, DIPENDA Tingkat I Sul-Sel, dan kantor BPS Tingkat I Sul-Sel yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

(2). Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi yang akan dipergunakan dalam karya ilmiah ini dikumpulkan dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

a. Untuk data primer penulis mengumpulkannya dengan metode wawancara.

- b. Data sekunder dikumpulkan dengan metode kepustakaan, dan mencatat data yang sudah ada di Kantor DLLAJ Tingkat I Sul-Sel, DIPENDA Tingkat I Sul-Sel, dan BPS Tingkat I Sul-Sel yang sesuai dengan penggunaannya.

3.3. Peralatan dan Model Analisis

Data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan model analisis kontribusi yang dikemukakan oleh Payaman Simajuntak dalam bukunya: "Ekonomi Sumber Daya Manusia" (1984 : 129) sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Kontribusi retribusi sektor j pada pendapatan asli daerah

Y_j = Pendapatan asli daerah sektor j

Y = Pendapatan asli daerah

j = Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Dengan menggunakan model analisis di atas maka dapatlah diketahui berapa persen sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

3.4. Konsep Operasional

Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sumbangan yang diberikan oleh retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulaesi Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, dinas-dinas pemerintah, BUMN/Swasta, dan lain-lain yang dihasilkan oleh daerah.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan yang diberlakukan kepada setiap kendaraan umum yang dikenakan wajib uji. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang atau orang.

Didefenisikan semua istilah pokok yang digunakan dalam penulisan yang tercantum dalam metode analisis sebagai berikut :

- S_j adalah kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Y_j adalah pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- Y adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- j adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor.

IV. PERKEMBANGAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PDRB PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.

4.1. Volume Kendaraan Bermotor dan Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perkiraan menuju arah tujuan yang ingin dicapai. sehingga tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan PP nomor 22 tahun 1990. pada tanggal 19-Desember 1990 oleh Menteri Perhubungan telah menyerahkan 10- (sepuluh) urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Su- lawesi Selatan dan 11 (sebelas) urusan kepada Kabupa- ten / Kotamadya Daerah Tingkat II, masing-masing: Dinas LLAJ Tk II Kodya Ujung Pandang, Kodya Pare-Pare, Kabupaten Bone, Luwu, Bulukumba, Polmas, Maros, Pinrang, Sidrap, Gowa dan Wajo.

Dilihat dari keadaan wilayahnya dimana Sulawesi Se- latan memiliki 23 Daerah tingkat II yang terdiri dari 2 (dua) Kotamadya, 2 Kotif, dan 19 Kabupaten, dengan luas wilayah ± 6.248.254 ha. Dengan luas wilayah tersebut sehingga jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya cukup jauh. Sehing- ga sarana transportasi khususnya angkutan darat sangat domi-

nan dalam kegiatan sehari-hari.

Melalui jalan darat mengalir dengan teratur suatu arus manusia dan barang yang diangkut dengan berbagai-bagai jenis kendaraan bermotor atau alat pengangkutan. Tempat-tempat besar dan kecil dimana arus itu mulai dengan membawa sejumlah penumpang-penumpang dan barang-barang, sehingga dikatakan sumber pengangkutan. Jika tempat-tempat besar dan kecil menghasilkan bahan yang perlu diangkut sehingga tempat-tempat tersebut sebagai pusat kegiatan ekonomi. Arahnya banyak kediaman manusia yang besar atau kecil tempat-tempat dimana orang banyak atau sedikit, dimana perniagaan telah berpusat, dimana orang mengusahakan industri dan kerajinan tangan, dimana bahan-bahan mentah dihasilkan, orang mengumpulkan hasil-hasil pertanian dari daerah sekelilingnya. Dengan kata lain, dimana ada kebutuhan yang tetap akan pengangkutan.

Sehingga kebutuhan akan pengangkutan terjadi pada tempat-tempat dimana ada didapati barang-barang yang harus dikirim ke tempat lain. Pengangkutan tersebut dilakukan dengan alat-alat yang khususnya dapat digunakan untuk barang-barang tersebut. Arus (aliran) pengangkutan yang bergerak melalui jalan-jalan lalu lintas, mengalir menuju dua jurusan. Jika arus (aliran) pengangkutan ke satu jurusan lebih kuat daripada ke jurusan lainnya, maka hal ini dinamakan disparte (ketidakseimbangan) pengangkutan dalam pengangkutan.

Begitulah misalnya di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pulau agraris (pertanian) arus (aliran) pengangkutan barang itu lebih kuat kejurusan di ibu kota-ibu kota Propinsi atau pelabuhan dari pada ke arah pedalaman.

4.1.1. Volume dan Jenis Kendaraan Bermotor

Pengusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum seperti bis besar/kecil, mobil barang/truck, mikrolet dan taxi dimana pengaturan dan pengendaliannya dilakukan dengan sistem perizinan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1993 tentang izin trayek perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.29/I/1994 tanggal 23 januari tentang aturan pelaksanaannya.

Pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan dan terminal dengan angkutan yang dimaksud adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan angkutan khususnya angkutan umum. Dewasa ini kendaraan bermotor sebagai angkutan umum masih tetap merupakan sektor yang paling dominan peranannya dalam kegiatan manusia sehari-hari.

Pada tabel.2 kita dapat melihat jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi
Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jumlah (unit)	Prosentase
1	1990	330.561	4.34
2	1991	343.376	3.87
3	1992	357.510	4.12
4	1993	340.220	4.34
5	1994	352.841	3.71

Sumber : DLLAJ Propinsi Tk.1 Sui-3e1

Dari tabel 2 tersebut di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan antara 3 - 5 % setiap tahun. Dengan pertumbuhan ini seiring dengan tingkat pemakaian dan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor tersebut.

Pada tahun 1990 jumlah kendaraan bermotor adalah 330.561 unit dengan tingkat kenaikan atau pertumbuhan 4.34 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Tahun 1991 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 343.376 unit dengan tingkat pertumbuhan 3.83 %.

yang berarti bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat sebanyak 12.815 yaitu dari 330.591 menjadi 343.406. Dengan jumlah tersebut berarti tingkat pertumbuhannya menurun dari 4,34% menjadi 4,12%.

Dalam tahun 1992 tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 4,12 % dengan jumlah 357.510 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 14.134 unit. Tetapi tahun 1993 jumlah kendaraan bermotor menurun dari 357.510 unit menjadi 340.220 unit terjadi penurunan sebanyak 17.290 unit. Dengan penurunan ini sehingga pertumbuhannya pun turun sebesar 4,84 %. Tahun 1994 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah kendaraan bermotor 352.341 unit sedangkan tingkat pertumbuhannya sebesar ± 3,71 % .

Dari tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan walaupun tahun 1993 terjadi penurunan. Jika dirata-ratakan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor antara 3 sampai 5 % pertahun.

Dari jumlah keseluruhan kendaraan bermotor tersebut dapat dibagi lagi berdasarkan jenisnya sebagaimana yang tertera pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenisnya

No	Tahun	Jenis Kendaraan			
		Mopen	B U S	M. Beban	Motor
1	1990	24.901	10.815	42.421	252.424
2	1991	27.769	11.301	43.457	260.703
3	1992	30.163	12.807	44.537	270.033
4	1993	33.817	8.085	42.100	225.118
5	1994	35.217	9.793	43.346	262.485
Jumlah		151.867	53.301	215.861	1.270.763

Sumber : DLLAJ Propinsi Tk.I Sul-Sel

Pada tabel 3 bahwa perkembangan yang menonjol selama lima tahun terakhir terjadi pada jenis kendaraan motor yang diikuti oleh mobil penumpang kemudian mobil beban. Sebaliknya perkembangan bus menurun.

Tahun 1990 jumlah mobil penumpang mencapai 24.901, bus 10.815, mobil beban 42.421, dan motor sebanyak 252.424. Kemudian pada tahun 1991 mobil penumpang mengalami peningkatan yaitu dari 24.901 menjadi 27.769 terjadi peningkatan sebesar 2.863 unit. Bus pada tahun 1991 terjadi peningkatan dari 10.815 menjadi 11.301 sehingga terjadi peningkatan sebesar 986. Untuk mobil beban juga terjadi peningkatan dari 42.421 tahun 1990 menjadi 43.457 tahun 1991. Ini juga terja-

di kenaikan sebanyak 1.036. Demikian juga dengan sepeda motor terjadi peningkatan sebanyak 8.279, yaitu dari 252.424 menjadi 260.703 pada tahun 1991.

Pada tahun 1992 jumlah kendaraan untuk semua jenis kendaraan mengalami peningkatan. Untuk mobil penumpang terjadi kenaikan sebanyak 2.394, bus sebanyak 1.006, mobil beban sebanyak 1.080, dan sepeda motor sebanyak 9.330.

Untuk tahun 1993 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor kecuali untuk jenis mobil penumpang mengalami kenaikan sebanyak 3.654. Sedangkan untuk jenis lainnya terjadi penurunan yaitu untuk bus turun sebanyak 4.722, mobil beban turun sebanyak 2.437, dan sepeda motor juga turun sebanyak 44.915.

Tapi pada tahun 1994 jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan untuk semua jenis kendaraan masing-masing untuk mobil penumpang menjadi 35.217, bus 9.793, mobil beban 43.46 dan sepeda motor kenaikannya menjadi 262.485.

Sangat perlunya untuk tetap terus menerus mengetahui banyaknya kendaraan bermotor, seperti kendaraan penumpang begitu juga dengan kendaraan barang. Untuk itulah perlunya perkiraan lalu lintas tersebut. Ini dapat dilakukan dengan kontrolir lalu lintas harus mengetahui besarnya arus pengangkutan. Jika ini dilakukan dengan teratur dalam tiap hari pada waktu yang tidak tertentu maka lambat laun kita akan mendapat suatu ikhtisar yang dapat dipergunakan.

Pemeliharaan jalan juga banyak ditentukan oleh jenis kendaraan yang melaluinya. Sehingga pemeliharaan jalan yang

dapat dilakukan dengan jalan melalui perizinan trayek/kartu pengawasan yang dikenakan terhadap kendaraan umum yaitu sebanyak 26.807.

Berikut kami akan memperlihatkan dalam tabel banyaknya kendaraan umum dari berbagai jenis yang mendapat izin trayek untuk dioperasikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Banyaknya Jenis Kendaraan Angkutan Umum
Berdasarkan Izin yang Dikeluarkan

No	Tahun	Jenis Kendaraan				Jumlah	%
		Truck	Bis	Non Bis	Taxi		
1	1990/91	8.525	1.585	6.552	180	16.842	93,80
2	1991/92	10.688	1.666	6.938	258	19.550	125,37
3	1992/93	11.737	2.241	6.692	385	21.055	109,81
4	1993/94	13.775	4.983	5.475	570	24.903	117,36
5	1994/95	14.685	1.405	10.087	760	26.937	106,60

Sumber : DLLAJ Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

Pada tabel 4 memperlihatkan perkembangan jenis-jenis kendaraan angkutan umum dalam lima tahun terakhir. Untuk truck dan taxi perkembangannya terus melaju dimana setiap tahun terus mengalami peningkatan hingga mencapai tahun anggaran 1994/1995 dimana truck mencapai 14.685 dan taxi sebesar 760 unit. Tetapi untuk jenis kendaraan bis dan non

bis dimana perkembangannya berfluktuasi. Untuk bis jumlah yang terbesar pada tahun 1993/1994 sebesar 4.983 sedangkan untuk non bis jumlah yang terbesar adalah tahun 1994/1995 dimana jumlahnya mencapai 10.087.

4.1.2. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka usaha peningkatan dan pembinaan masyarakat, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, baik dari segi kuantitas pembangunan maupun dalam sisi kualitas dalam hasil yang dicapai pada pelaksanaan Repelita sangat diperlukan adanya program pembangunan yang terpadu dengan pelaksanaannya.

Sebagai realisasi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab khususnya di bidang pendapatan daerah yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan setiap tahun dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah daerah setempat, untuk itu usaha intensifikasi pada setiap jenis sumbangan keuangan yang ada maupun eksentifikasi pajak, retribusi, dan lain-lain.

Hasil nyata dari tendensi yang diterapkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan meningkatnya pajak dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel 5 sebagai berikut :

TABEL 5

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995

NO	PAJAK DAERAH	T A H U N					
		1990/1991 (Rp)	1991/1992 (Rp)	1992/1993 (Rp)	1993/1994 (Rp)	1994/1995 (Rp)	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.067.241.896	8.685.857.715	11.597.033.504	11.513.386.993	15.995.984.563	
2	BBN Kendaraan Bermotor	12.119.954.768	9.457.030.928	10.751.932.475	12.834.092.039	24.453.606.768	
3	Tunggakan Pajak	192.682.456	200.230.835	176.924.919	232.069.319	266.973.307	
4	Denda Pajak	161.536.802	193.574.684	272.837.959	242.449.827	445.998.073	
5	PKN AJ	-	-	3.687.907	15.955.400	17.238.143	
6	BNN KIR AJ	-	-	3.803.045	28.823.870	17.819.183	
	J U M L A H	20.541.415.922	18.540.694.162	22.806.219.309	24.916.677.444	41.197.620.337	

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

Dari tabel 5 tersebut ada beberapa pajak daerah yang menonjol peningkatannya. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang potensial, karena pajak ini adalah merupakan pajak yang meningkat setiap tahunnya.

Pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran 1990 / 1991 sebesar Rp 8.067.241.896.- pada tahun anggaran 1991/1992 me-ningkat menjadi Rp 8.685.857.715.-. Kemudian tahun anggaran 1992/1993 meningkat lagi sebesar Rp 11.5596.033.504.-. Tetapi tahun anggaran 1993/1994 mengalami penurunan yaitu Rp 11.513.386.993.- kemudian meningkat tahun anggaran 1994/1995 Rp 15.995.984.863.-

Untuk bea balik nama kendaraan pada tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp 8.750.000.000.- meningkat menjadi Rp 9.457.030.928.- pada tahun anggaran 1991/1992. Pada tahun anggaran 1992/1993 kembali terjadi peningkatan yaitu Rp 10.751.932.475.- kemudian diikuti tahun anggaran 1993/1994 Rp 12.884.092.039.-. Tahun anggaran 1994/1995 mengalami peningkatan yang drastis dengan prosentase 132,18 yaitu sebesar Rp 24.453.608.768.-

Pajak daerah yang pertumbuhannya lambat yaitu tunggakan pajak, dimana tahun anggaran 1990/1991 Rp 192.682.456.- terjadi peningkatan yang kecil pada tahun anggaran 1991/1992 yaitu Rp 200.230.835.-. Tetapi pada tahun anggaran 1992/1993 terjadi penurunan Rp 176.924.919,- kemudian naik kembali tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp 232.069.319,-. Kemudian tahun anggaran 1994/1995 terjadi peningkatan yang relatif

yaitu Rp 266.973.307.-

Pajak daerah yang lainnya adalah denda pajak walaupun kecil tetapi jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat. Tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp 161.936.802.- tahun anggaran 1991/1992 menjadi Rp 197.974.684.-. Untuk tahun anggaran 1992/1993 sebesar Rp 272.837.959.- turun menjadi Rp 242.449.827.- kemudian tahun anggaran 1994/1995 meningkat menjadi Rp 445.998.073.-

Untuk pajak daerah berupa PKB A3 dan BBN KB A3 tahun anggaran 1990/1991 dan 1991/1992 belum terealisasi penerimaannya. Tahun anggaran 1992/1993 barulah terealisasi, yaitu untuk PKB A3 Rp 3.687.907.- terjadi peningkatan drastis tahun anggaran 1993/1994 Rp 15.855.400.- kemudian tahun anggaran 1994/1995 peningkatannya 100 % yaitu Rp 17.238.143.-Demikian juga untuk BBN KB A3 tahun anggaran 1992/1993 sebesar Rp 3.803.045.- kemudian meningkat drastis tahun anggaran 1993/1994 Rp 28.823.870 dan tahun anggaran 1994/1995 menurun menjadi Rp 17.819.183.-.

Dengan meningkatnya pajak daerah dalam kurun waktu lima tahun mempengaruhi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lain. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang juga meningkat yaitu retribusi yang dapat dilihat dalam tabel 6 sebagai berikut :

TABEL 6
REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

NO	RETRIBUSI DAERAH	T A H U N					
		1990/1991	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1990/1995
1	Retribusi Daerah	4.366.700	103.622.000	1.259.935.550	1.816.149.000	1.366.611.500	4.366.611.500
2	Bantuan Dana DADI	771.733.606	832.388.149	123.338.000	135.838.750	215.933.500	215.933.500
4	Rumah Sakit Umum Labuang Jaji	326.954.041	376.671.205	947.360.445	379.497.210	303.589.295	303.589.295
5	Rumah Bersalin Sitti Fatimah	50.394.176	47.663.788	56.793.388	615.342.220	143.945.375	143.945.375
6	Balai Pengobatan gigi	52.964.700	49.803.525	47.153.425	95.951.200	67.026.850	67.026.850
7	Prakwalifikasi	118.375.000	128.850.000	66.250.000	48.520.120	127.377.700	127.377.700
8	Turan Tambang Glo. C	1.795.386.505	2.420.714.285	66.250.000	59.084.988	340.375.000	340.375.000
9	IPPP Irigasi	185.597.456	151.556.571	4.084.363.486	6.014.550.000	10.253.614.287	10.253.614.287
10	Turan Pembangunan P.A.B.T	51.954.770	74.238.740	143.165.198	100.963.695	59.448.910	59.448.910
11	Izin Trayek	356.316.000	421.750.500	457.199.000	141.927.476	143.149.880	143.149.880
12	Izin Usaha Perikanan	3.616.250	6.968.000	10.642.145	545.520.000	777.776.500	777.776.500
13	Ret. Ikan asin dan Hasil Laut	-	29.376.225	30.657.051	12.531.975	11.385.325	11.385.325
14	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	-	130.014.706	147.632.258	30.372.020	21.396.680	21.396.680
15	Peng. bhn. Asal Hewan	-	30.966.339	29.204.600	204.226.908	379.641.537	379.641.537
16	Dokumentasi Pelelangan	-	-	-	23.595.320	14.052.070	14.052.070
17	Usaha Kawasan Pariwisata	-	-	-	384.743.000	153.543.000	153.543.000
18	Turan air Permukiman	-	-	-	7.102.750	-	-
19	Usaha Rumah Makan dan Restoran	-	-	-	331.116.733	346.838.104	346.838.104
20	Usaha Rekreasi dan Hiburan	-	-	-	4.649.560	5.184.000	5.184.000
21	Usaha Pgl. Hotel dgn Bng. Malati	-	-	-	6.675.000	6.895.000	6.895.000
22	Pengendalian/Penerciban Hiras	-	-	-	7.014.000	5.755.050	5.755.050
22	Upah Uji	241.216.500	249.902.250	-	-	-	-
23	Surat Tanda Uji	73.106.000	70.161.500	-	-	-	-
24	Tanda Plat Keur	159.873.500	168.151.000	-	-	-	-
	J U M L A H	4.569.049.504	5.597.200.783	8.384.573.632	9.041.539.107	15.770.687.593	15.770.687.593

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

mengalami penurunan menjadi Rp 30.372.020,- dan tahun anggaran 1994/1995 menurun kembali menjadi Rp 21.396.680,-

Penerimaan pengujian mutu hasil perikanan tahun anggaran 1991/1992 sebesar Rp 130.014.706,- tahun anggaran 1992/1993 mengalami peningkatan menjadi Rp 147.632.258,- tahun anggaran 1993/1994 meningkat lagi menjadi Rp 204.226.908,- dan tahun anggaran 1994/1995 menjadi Rp 379.641.537,-.

Pemeriksaan dan atau pengujian bahan asal hewan dan hasil bahan hewan tahun anggaran 1991/1992 sebesar Rp 30.966.339,- tahun anggaran 1992/1993 mengalami penurunan menjadi Rp 29.204.600,- tahun anggaran 1993/1994 kembali menurun menjadi Rp 23.595.320,- dan pada tahun anggaran 1994/1995 menjadi Rp 14.052.070,-.

Sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain yang memberikan peningkatan penerimaan ialah penerimaan dinas-dinas yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 7
 REALISASI PENERIMAAN DINAS-DINAS TERHADAP
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROPINSI TINGKAT I
 SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

NO	PENERIMAAN DINAS-DINAS	T A H U N				
		1990/1991 (Rp)	1991/1992 (Rp)	1992/1993 (Rp)	1993/1994 (Rp)	1994/1995 (Rp)
1	Dinas Pertanian	100.210.825	116.805.910	109.012.915	106.804.991	121.903.075
2	Dinas Kehutanan	3.345.798	14.816.757	-	2.437.197	-
3	Dinas Perkebunan	734.078.919	51.448.421	-	-	17.925.000
4	Dinas Peternakan	16.565.800	20.965.000	17.401.000	3.956.000	4.266.000
5	Dinas Perikanan	140.607.033	4.819.400	7.070.825	3.232.000	1.321.000
6	Dinas Pariwisata	-	6.030.250	6.335.700	3.244.800	6.367.800
	J U M L A H	994.808.366	214.885.738	139.820.440	119.674.988	151.783.375

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

Dari tabel 7 tersebut terlihat bahwa Dinas Pertanian adalah dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. kemudian diikuti oleh Dinas perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan.

Untuk Dinas Pertanian sumbangan yang diberikan berfluktuasi begitupun dinas-dinas yang lain. Pada tahun anggaran 1990/1991 penerimaan Dinas Pertanian sebesar Rp 100.210.825.- untuk tahun anggaran 1991/1992 mengalami peningkatan menjadi Rp 116.805.910.- tahun anggaran 1992/1993 menurun menjadi Rp 109.012.915.- pada tahun anggaran 1993/1994 kembali menurun menjadi Rp 106.804.991.- dan tahun anggaran 1994/1995 meningkat kembali menjadi Rp 121.903.075.-

Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 1990/1991 yang diperoleh sebesar Rp 3.345.789.- untuk tahun anggaran 1991/1992 penerimaan meningkat menjadi Rp 14.816.757.- sedang untuk tahun anggaran 1992/1993 tidak terealisasikan. tahun anggaran 1993/1994 penerimaannya sebesar Rp 2.437.197.- dan tahun anggaran 1994/1995 tidak ada realisasi.

Dinas Perkebunan tahun anggaran 1990/1991 penerimaannya sebesar Rp 734.078.919.- tahun anggaran 1991/1992 menurun menjadi Rp 51.448.421.- tahun anggaran 1992//1993 dan 1993/1994 tidak ada realisasi penerimaan. Pada tahun anggaran 1994/1995 penerimaannya sebesar Rp 17.925.000.-.

Penerimaan dari Dinas Peternakan tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp 16.565.800.- tahun anggaran 1991/1992 meningkat menjadi Rp 20.565.000.- untuk tahun anggaran 1992/1993 mengalami penurunan menjadi Rp 17.401.000.- tahun anggaran 1993/1994 menjadi Rp 3.956.000.- dan pada tahun anggaran 1994/1995 kembali meningkat menjadi Rp 4.266.000.-.

Tahun anggaran 1990/1991 penerimaan Dinas Perikanan sebesar Rp 140.607.033.- tahun anggaran 1991/1992 mengalami penurunan menjadi Rp 4.819.400.- tahun anggaran 1992/1993 meningkat menjadi Rp 7.070.325.- tahun anggaran 1993/1994 kembali turun menjadi Rp 3.232.000.- dan pada tahun anggaran 1994/1995 menjadi Rp 1.321.000.-.

Untuk Dinas Pariwisata tahun anggaran 1990/1991 belum terealisasikan. tahun anggaran 1991/1992 penerimaannya sebesar Rp 6.030.250.- tahun anggaran 1992/1993 meningkat menjadi Rp 6.335.200.- untuk tahun anggaran 1993/1994 mengalami penurunan menjadi Rp 3.244.800.- dan tahun anggaran 1994/1995 kembali meningkat menjadi Rp 6.367.300.-.

Sedangkan penerimaan lain yang menambah pendapatan asli daerah yaitu laba BUMD sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3

REALISASI PENYERAPAN LABA BRND TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI TINGKAT I

SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

NO	LABA B U M D	T A H U N				
		1990/1991 (Rp)	1991/1992 (Rp)	1992/1993 (Rp)	1993/1994 (Rp)	1994/1995 (Rp)
1	Bank Pembangunan Daerah	200.000.000	320.061.466	100.000.000	90.551.733	264.548.999
2	P D A M	-	-	-	-	-
3	Perusahaan Daerah Sul - Sel	10.565.353	15.000.000	15.000.000	20.000.000	50.000.000
4	PT. K I M A	-	-	93.962.602	-	108.792.000
	J U M L A H	210.565.353	335.061.466	208.962.602	110.551.733	423.340.999

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

Dari tabel 8 tersebut terlihat perkembangan penerimaan dari laba badan usaha milik daerah. Penerimaan dari laba Bank Pembangunan Daerah tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp 200.000.000.- tahun anggaran 1991/1992 mengalami peningkatan menjadi Rp 320.061.466.- untuk tahun anggaran 1992/1993 mengalami penurunan menjadi Rp 100.000.000.- tahun anggaran 1993/1994 menjadi Rp 90.551.733.- dan pada tahun anggaran 1994/1995 mengalami peningkatan menjadi Rp 264.348.999.-

Untuk penerimaan dari perusahaan air minum daerah tidak terealisasi karena pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang. Laba yang lainnya yaitu Laba Perusahaan Daerah Sulawesi selatan tahun anggaran 1990/1991 Rp 10.565.353.- tahun anggaran 1991/1992 meningkat menjadi Rp 15.000.000.- untuk tahun anggaran 1992/1993 tidak ada peningkatan ataupun penurunan. tahun anggaran 1993/1994 meningkat menjadi Rp 20.000.000.- dan tahun anggaran 1994/1995 meningkat lagi menjadi Rp 50.000.000.-.

Penerimaan dari PT KIMA baru terealisasi pada tahun anggaran 1992/1993 sebesar Rp 93.692.602.- untuk tahun anggaran 1993/1994 tidak ada penerimaan dan tahun anggaran 1994/1995 penerimaannya menjadi Rp 108.792.000.-.

4.2. Sumbangan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan

Kondisi dasar pembangunan wilayah Sulawesi Selatan dalam garis besarnya diarahkan pada: penataan kawasan produksi yang lebih dikenal dengan perwilayahan komoditas dan lebih dikembangkan lagi dengan pengelolaan industri pada pusat-pusat pengemboangan komoditas, konfigurasi pusat pembangunan atau pusat pelayanan, dan sistem transportasi efektif dan efisien.

Dari pusat-pusat pelayanan di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa Ujungpandang sebagai ibukota Propinsi memiliki luas daya tarik relatif dan bobot fungsi distribusi relatif yang terbesar di kawasan timur Indonesia, dan merupakan simpul distribusi yang sangat efisien.

Potensi Sulawesi Selatan untuk menjadi pusat pelayanan pembangunan di KTI adalah sangat memadai dan melebihi kota-kota lainnya di KTI. Bidang-bidang pelayanan yang sangat menonjol untuk memenuhi sebagian pusat pelayanan adalah :

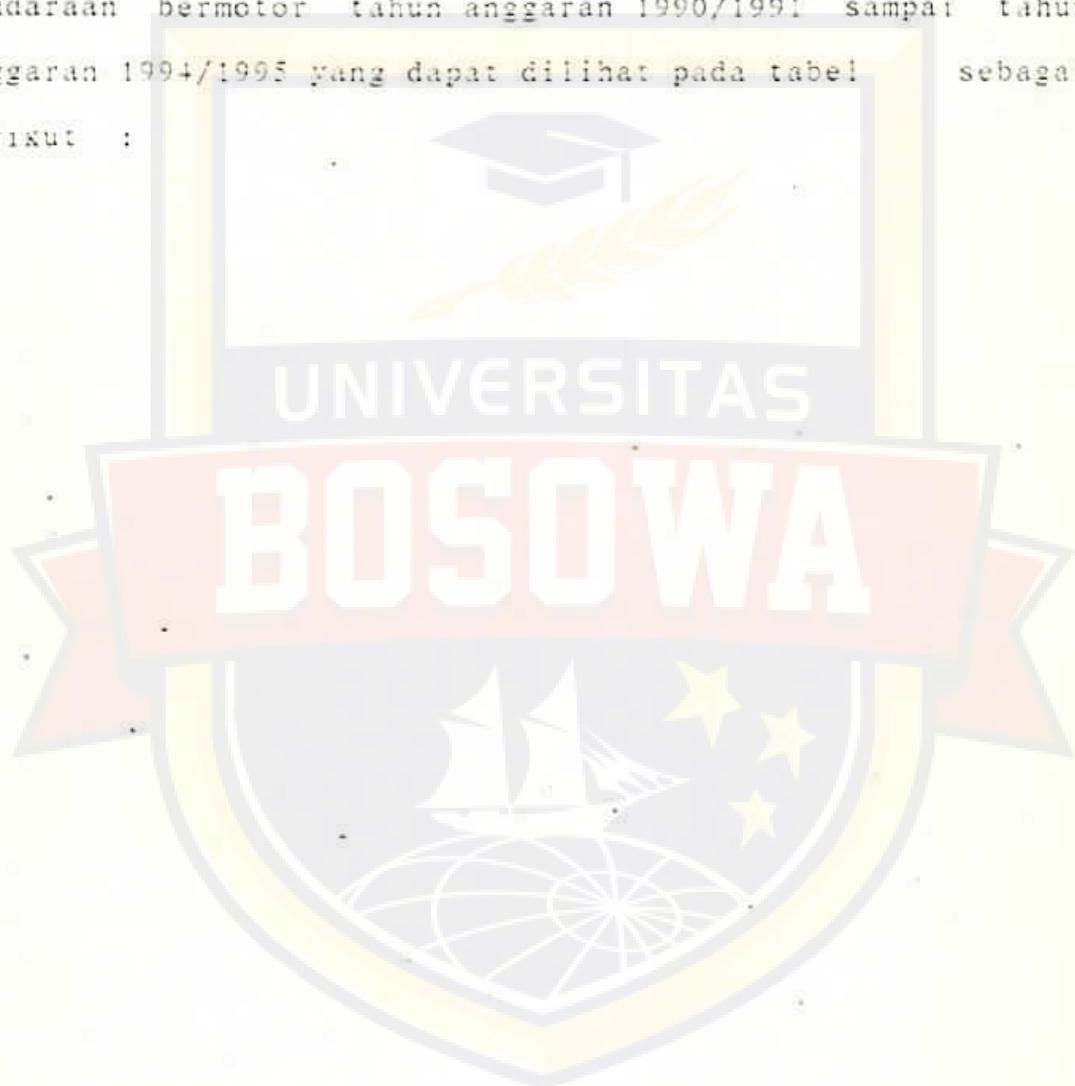
1. Pelayanan pengembangan pendidikan: untuk pelayanan ini Ujungpandang telah dikembangkan melalui Universitas negeri/swasta, IKIP, akademi-akademi, pendidikan menengah kejuruan serta kursus-kursus lainnya.
2. Pelayanan jasa iptek: adanya laboratorium, research, lab workshop.

3. Pelayanan perdagangan, seperti ekspor/impor, dalam negeri dimana Ujungpandang sangat efisien untuk dijadikan sentra pengumpulan hasil-hasil pertanian dan industri untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Pemasokan barang kebutuhan KTI: barang-barang yang menonjol seperti beras, terigu, tepung, semen dan industri lainnya.
5. Pelayanan jasa medis, yaitu dibangunnya rumah sakit regional di Ujungpandang dan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.
6. Pelayanan jasa industri pembangunan dan reparasi kapal.
7. Pelayanan jasa angkutan; jasa angkutan laut, jasa angkutan darat, jasa angkutan udara.
8. pelayanan jasa konstruksi.
9. pelayanan usaha dan industri.

4.2.1. Sumbangan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Propinsi Sulawesi Selatan

Pengembangan daerah Sulawesi Selatan terkait dengan propinsi-propinsi lain di IBT, terutama dalam distribusi barang dan jasa atau untuk meningkatkan keterkaitan perdagangan antar daerah di IBT, perlu dilakukan pengkajian mengenai potensi yang dimiliki, konfigurasi pusat-pusat pelayanan, orientasi perdagangan atau ketersediaan fasilitas transportasi dan lainnya.

Olehnya itu untuk dapat menunjang pembangunan nasional maka perlu pembiayaan pembangunan. Untuk dapat membiayai pembangunan daerah maka salah satu pungutan yang diperlukan adalah kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Maka berikut ini akan disajikan data mengenai besarnya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/1995 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



TABEL 2

REALISASI SUMBANGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI PROPINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Prosentase
	Rp	Rp	
1990/1991	306.767.500	301.330.500	101,71
1991/1992	307.000.000	304.402.000	99,15
1992/1993	884.000.000	1.259.935.550	142,53
1993/1994	1.500.000.000	1.816.149.000	121,08
1994/1995	2.000.000.000	1.866.611.500	93,33

Sumber : Kantor DLLAJ Propinsi Tk.I Sul-Sel

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun realisasi sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Selatan masih berfluktuasi. Dengan kata lain prosentasenya berubah-ubah. Prosentase yang terbesar dicapai pada tahun 1992/1993 yaitu 142,53 % dimana ditargetkan penerimaannya sebesar Rp 884.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya adalah sebesar Rp 1.259.935.550.

Pada tahun 1994/1995 target yang ditetapkan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor ini adalah sebesar Rp 2.000.000.000 tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 1.866.611.500. sehingga tidak mencapai target yang diharapkan.

Turunnya sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 1994/1995 disebabkan oleh :

- Meningkatnya kesadaran pengusaha/pemilik kendaraan mematuhi kewajibannya untuk menguji kendaraannya pada waktunya, sehingga pengenaan denda semakin berkurang.
- Adanya Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 tahun 1993 dimana setiap kendaraan masa pengujiaannya rata-rata selama 6 (enam) bulan atau dua kali setahun, sedangkan sebelum diberlakukannya kedua ketentuan tersebut di atas, masa pengujian setiap kendaraan bermotor bervariasi antara 2 atau 3 kali dalam setahun.
- Meningkatnya kendaraan yang rusak / tidak laik jalan.
- Kendaraan yang pindah/numpang uji di wilayah lain.
- Jaringan atau rentang pengawasan yang terbatas.

Dampak dari sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 10

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995

Tahun	T a r g e t	Realisasi	Prosentase
Anggaran	Rp	Rp	
1990/1991	23.990.507.690	28.524.781.978	124,07
1991/1992	29.803.505.300	27.399.532.320	91,93
1992/1993	40.131.709.490	38.218.063.379	95,23
1993/1994	43.213.219.020	35.943.819.234	83,17
1994/1995	56.585.753.130	59.389.962.250	104,95

Sumber : Kantor Dipenda Pemda Tk. I Sul-Sel

Bila kita melihat tabel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan selama lima tahun anggaran terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam tabel tersebut terjadi peningkatan yang drastis pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp 59.389.969.250.- dengan target sebesar Rp 56.585.753.130.- dan prosentase yang dicapai adalah 104,95 .

Sedangkan tingkat prosentase yang rendah terjadi pada tahun anggaran 1991/1992 yaitu dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 27.399.532.320.- yang tidak melampaui target yang diharapkan yaitu sebesar Rp 29.803.505.300.- dan prosentase yang dicapai 91,93 .

Selanjutnya untuk mengetahui prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



TABEL 11

PROSENTASE SUMBANGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Sumbangan Retribusi PKB (Rp)	Prosentase (%)
1	1990/1991	28.524.781.978	301.339.500	1,056
2	1991/1992	27.399.532.320	304.402.000	1,110
3	1992/1993	38.220.063.376	1.259.935.550	3,290
4	1993/1994	35.944.719.232	1.816.149.000	5,052
5	1994/1995	59.389.962.250	1.866.611.500	3,143
	Jumlah	189.479.059.156	5.548.437.550	2,928

Sumber : Kantor Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Sul-Sel (data diolah kembali)

Dari tabel tersebut terlihat sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan, sedangkan prosentase dalam tabel tersebut dari tahun ke tahun berfluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun anggaran 1990/1991 sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp 301.339.500 dengan prosentase 1.056 sedangkan penerimaan keseluruhan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar Rp 28.524.781.978.-.

Untuk tahun anggaran 1991/1992 kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan menjadi Rp 304.402.000.- sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurun, yaitu Rp 27.399.532.320.- dengan tingkat prosentase adalah 1.110.

Pada tahun anggaran 1992/1993 terjadi peningkatan yang drastis pada kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp 1.259.935.550.- sedangkan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga meningkat yaitu sebesar Rp 38.220.063.376.- dengan prosentase sebesar 3,290 . Demikian juga terhadap tahun anggaran 1993/1994 dimana prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terjadi peningkatan sebesar 5.052 %. Dengan penerimaan untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp 1.816.149.000.- dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 35.944.719.232.-.

Sebaliknya tahun anggaran 1994/1995 dimana total penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebesar Rp 59.389.962.250.- sedangkan total penerimaan sebelumnya yakni tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp 35.944.719.232.-. Tetapi prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan yaitu 3,143.

Penurunan prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor disebabkan oleh meningkat drastisnya Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Kalau kita kembali memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar terlihat dengan prosentase kontribusi yang dicapai. Sebaliknya menurunnya prosentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah disebabkan oleh berkurangnya masa pengujian bagi kendaraan angkutan umum dan adanya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1992 tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pelanggaran kurang terjadi.

Untuk membuktikan prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tabel II tersebut, maka penulis menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Payaman simajuntak, (1984 ; 129) sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Kontribusi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah

Y_j = Pendapatan Asli Daerah sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Y = Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan

j = sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari rumus ini diperoleh kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tahun anggaran 1990/1991 sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100\%$$

301.339.500

$$S_j = \frac{28.524.781.978}{301.339.500} \times 100 \%$$

$$S_j = 1.056 \%$$

Untuk tahun anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 304.402.000 \\ \text{Sj} &= \frac{\quad\quad\quad}{27.399.532.320} \times 100 \% \\ \text{Sj} &= 1.110 \% \end{aligned}$$

Sedang tahun anggaran 1992/1993 prosentase kontribusi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 1.259.935.550 \\ \text{Sj} &= \frac{\quad\quad\quad}{38.220.063.376} \times 100 \% \\ \text{Sj} &= 3.290 \% \end{aligned}$$

Untuk tahun anggaran 1993/1994 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 1.816.149.000 \\ \text{Sj} &= \frac{\quad\quad\quad}{35.944.719.232} \times 100 \% \\ \text{Sj} &= 5.052 \% \end{aligned}$$

Dan untuk tahun anggaran 1994/1995 prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

$$Sj = \frac{1.866.611.500}{59.389.963.250} \times 100 \%$$

$$Sj = 3.143 \%$$

Untuk lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1990/1991 sampai dengan tahun anggaran 1994/1995 prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebesar :

$$Sj = \frac{Y}{Vj} \times 100 \%$$

$$Sj = \frac{5.548.437.550}{290.515.206.288} \times 100 \%$$

$$Sj = 1.91$$

Dari hasil perhitungan kontribusi tersebut di atas, maka dapatlah diketahui sumbangan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tahun anggaran 1990/1991 sebesar 1.056 %, tahun anggaran 1991/1992 sebesar 1.110 %, tahun anggaran 1992/1993 sebesar 3.290 %, pada tahun anggar-

an 1993/1994 sebesar 5.052 % , dan untuk tahun anggaran 1994/1995 sebesar 3.143 %. Sedang untuk lima tahun anggaran sebesar 2,928 persen.

4.2.2. Sumbangan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan

Dengan perkembangan waktu dan perbaikan sistem transportasi yang menghubungkan hinterland dengan foreland, maka ciri keterkaitan antar daerah menjadi makin luas dan lebih kompleks. Kompleksitas sistem produksi dan distribusi menampakkan pusat pelayanan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai.

Tingginya mobolitas produksi bagi suatu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dalam hal ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebab transportasi merupakan urat nadi perekonomian, disamping itu juga melancarkan pendistribusian barang-barang atau produk-produk ke seluruh pelosok sehingga kegiatan perekonomian suatu daerah dapat ditingkatkan dengan lancarnya transportasi tersebut.

Berikut ini kami akan menyajikan PDRB Propinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 12

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 1990 - 1994

(Juta Rp)

No	LAPANGAN USAH	1990	1991	1992	1993	1994
1	PERTANJIAN	1.178.872,81	1.282.530,44	1.356.180,24	1.446.348,43	1.545.134,03
2	PERTAMBAHAN DAN GUNJIAN	60.372,36	75.382,29	78.580,04	78.580,04	84.859,97
3	INDUSTRI PENGOJAHAN	227.639,32	249.948,64	299.845,02	325.427,60	369.588,13
4	LISTRIK, GAS DAN AIR	33.774,96	36.180,25	38.215,91	41.263,42	44.275,65
5	B A N G U N A N	107.002,18	114.963,14	124.570,71	134.921,32	145.593,75
6	PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL	468.251,41	545.943,22	595.261,29	633.139,32	692.401,16
7	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	255.325,94	272.202,02	291.737,02	321.923,32	347.516,22
8	BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN	49.358,90	41.943,60	42.670,03	50.001,13	51.731,17
9	SEWA RUMAH	114.893,18	118.087,63	121.354,16	125.188,95	128.894,54
10	PEMERINTAH DAN HANKAM	261.508,89	283.219,90	305.925,60	338.784,56	366.564,89
11	JASA - JASA	27.605,04	29.463,30	31.732,92	33.595,58	35.957,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		2.784.504,99	3.049.363,12	3.286.072,94	3.539.804,53	3.820.511,02

Sumber : Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa produk domestik regional bruto dari tahun ke tahun terus meningkat. Yaitu pada tahun 1990 PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp 2.784.504,99 juta. Pada tahun 1991 nilainya meningkat menjadi Rp 3.049.363,12 juta, jadi ada kenaikan sebesar 109.51 %.

Demikian pula PDRB pada tahun 1992 naik sebesar 107.76 % dengan nilai Rp 3.286.072.94 juta. Hal yang sama terjadi pada tahun 1993 dengan nilai PDRB sebesar Rp 3.539.804,53 % sehingga naik sebesar 107.72 %. Pada tahun 1994 nilai PDRB juga mengalami kenaikan sebesar 107.93 % dengan nilai sebesar Rp 3.820.511.02 juta.

Sekarang marilah kita melihat besarnya sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap produk domestik regional bruto Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:



TABEL 13

PROSENTASE SUMBANGAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
 TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
 PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 1990-1994

NO	TAHUN	PDRB SUL - SEL Kp	SUMBANGAN RETRIBUSI PKB Kp	PROSENTASE
1	1990	2.784.504.990.000	301.339.500	0.0108
2	1991	3.049.368.120.000	304.402.000	0.0099
3	1992	3.286.072.940.000	1.259.935.550	0.0383
4	1993	3.539.804.530.000	1.816.149.000	0.0513
5	1994	3.820.511.020.000	1.366.611.500	0.0488
TOTAL		16.480.261.600.000	5.548.437.550	0.0336

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Tk.I Sul-Sel (data diolah kembali)

Dari tabel tersebut terlihat sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami peningkatan, sedangkan prosentase dalam tabel tersebut dari tahun ke tahun berfluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun anggaran 1990 sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp 301.339.500 dengan prosentase 0,0108 sedangkan total produk domestik regional bruto (PDRB) adalah sebesar Rp 2.784.504.990.000.-.

Untuk tahun 1991 kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang diikuti pula oleh naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PAD). Yaitu Rp 304.402.000,- dan Rp 3.049.368.120.000,- dengan tingkat prosentase adalah 0,0099.

Pada tahun 1992 terjadi peningkatan yang drastis pada kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp 1.259.935.550,- sedangkan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebesar Rp 3.286.072.940.000,- dengan prosentase sebesar 0,0383. Demikian juga terhadap tahun anggaran 1993 dimana prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor terjadi peningkatan sebesar 0,0513.

Sebaliknya tahun 1994 dimana total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan yang drastis yaitu sebesar Rp 3.820.511.020.000,- sedangkan total penerimaan sebelumnya yakni tahun 1993 sebesar Rp

3.539.804.530.000,-. Tetapi prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan yaitu 0.0488.

Penurunan prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor disebabkan oleh meningkat drastisnya Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan. Kalau kita kembali memperhatikan perkembangan sektor-sektor dalam PDRB di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, maka kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk peningkatan sektor Angkutan dan Komunikasi sangat besar terlihat dengan prosentase kontribusi yang dicapai yaitu rata-rata 107,95 %.

Untuk membuktikan prosentase sumbangan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tabel II tersebut, maka penulis menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Payaman simajuntak, (1984 : 129) sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100 \%$$

Dimana :

S_j = Kontribusi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada PDRB

Y_j = Pendapatan Asli Daerah sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Y = Produk Domestik Regional Bruto keseluruhan

j = sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari rumus ini diperoleh kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tahun 1990 sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100\%$$

$$S_j = \frac{301.339.500}{2.784.504.990.000} \times 100\%$$

$$S_j = 0.0108\%$$

Untuk tahun 1991 sebagai berikut :

$$S_j = \frac{304.402.000}{3.049.368.120.000} \times 100\%$$

$$S_j = 0.0099\%$$

Sedang tahun 1992 prosentase kontribusi sebagai berikut :

$$S_j = \frac{1.259.935.550}{3.286.072.940.000} \times 100\%$$

$$S_j = 0.0383\%$$

Untuk tahun 1993 sebagai berikut :

$$Sj = \frac{1.816.149.000}{3.539.804.530.000} \times 100 \%$$
$$Sj = 0.0513 \%$$

Dan untuk tahun 1994 prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$Sj = \frac{1.866.611.500}{3.820.511.020.000} \times 100 \%$$
$$Sj = 0.0488 \%$$

Untuk lima tahun yaitu tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 prosentase kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebesar :

$$Sj = \frac{Yj}{Y} \times 100 \%$$
$$Sj = \frac{5.548.437.550}{16.480.261.600.000} \times 100 \%$$
$$Sj = 0.0336 \%$$

Dari hasil perhitungan kontribusi tersebut di atas, maka dapatlah diketahui sumbangan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tahun 1990 sebesar 0,0108 %, tahun 1991 sebesar 0,0099 %, tahun 1992 sebesar 0,0383 %, pada tahun 1993 sebesar 0,0513 % dan untuk tahun 1994 sebesar 0,0488 %. Sedang untuk lima tahun sebesar 0,0336 persen.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak lepas dari banyaknya jumlah kendaraan yang dipergunakan sebagai jasa transportasi atau angkutan umum.
2. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor angkutan umum diiringi dengan peningkatan sarana transportasi yang memadai sehingga hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat berjalan lancar.
3. Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah telah berusaha menggali sumber-sumber yang ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 1990/1991-1993/1994 persentasenya terus meningkat. Tapi tahun anggaran 1994/1995 persentasenya menurun.
5. Bila kita melihat realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun meningkat dan dengan prosen-

tase yang dicapai ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

3.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh tersebut di atas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- Dengan diketahuinya bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pungutan retribusi tersebut.
- Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kantor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Untuk melancarkan kegiatan pengujian tersebut maka perlu untuk menaikan kendaraan operasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Khususnya dalam bidang lalu lintas maka perlu diadakan sosialisasi undang-undang No 14 tahun 1992 sehingga tercipta kesadaran dan ketertiban dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achir, M.M. Asni, 1975. " Masalah Keuangan Negara " , CV. Yulianti, Bandung.
2. Brothodiharjo, Santoso, 1986. " Pengantar Ilmu Hukum Pajak " , PT. Erosco, Bandung.
3. Gill, Richard, 1983. " Ekonomi Pembangunan Dulu Dan Sekarang " , Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Mulia, Drs. 1987. " Keuangan Daerah " , Tamita Raya, Jakarta.
5. Poerdarminto, W.J.S, 1976. " Kamus Umum Bahasa Indonesia " , Balai Pustaka, Jakarta.
6. Pringgodigdo, A.G, 1977. " Ensiklopedi Umum " , Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
7. Rohmat Soemitro, SH.DR.Prof, 1981. " Pengantar Singkat Hukum Pajak " , PT. Erosco, Bandung.
8. Simajuntak, Payaman, 1984. " Ekonomi Sumber Daya Manusia " , Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
9. Soepardi, 9180. " Pengelolaan Keuangan Daerah " , Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
10. Sukirno, Sadono, 1985. " Ekonomi Pembangunan Proses Masalah adn Kebijakanaksanaan " , Bina Graha, Jakarta.
11. Suparmoko, M.DR>MA, 1986. " Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek " , BPFE, Yogyakarta.
12. _____, Undang-undang No 5 Tahun 1974.
13. _____, Peraturan Daerah No 7 Tahun 1991.
14. _____, Perda No 6 Tahun 1985